



Rekonsiliasi Antarumat Beragama Kristen dan Islam di Ambon Maluku

Amin Tohari

UIN Sunan Ampel Surabaya

amintohariuinoke@gmail.com

Abstract: Religion solves social problems in society, peace is the goal of religion being sent down to the world. However, in reality, religious life cannot be separated from conflicts that result in bloodshed wars. This research examines reconciliation between religious adherents (Christianity and Islam) in the bloody conflict in Ambon, Maluku, 1999-2000. The method used is descriptive-qualitative and social anthropological approaches with a touch of interreligious relations in reconciliation for peace. This research is based on a peripheral Islamic study that emphasizes the locality of the conflict area which is peripheral and local, namely in Ambon. This article is focused on the 20 Wayame Team, which is engaged in interfaith reconciliation efforts in Ambon, which involved two conflicting religious groups (Muslims and Christians). The various reconciliation efforts undertaken by Team 20 include: First, forming equal members from Muslim and Christian elements in one team. Second, actively holding interfaith dialogue in every riot incident in Ambon city as an early evaluation and anticipation. Third, make 4 (four) rules that Christians and Muslims must obey, complete with sanctions and corporal punishment for those who violate them. Fourth, Team 20 actively conducts cross-religious dialogues with residents to detect early outside influences that can create seeds of hostility. Fifth, collaborating with the TNI military as a supervisor and protector of the community from external influences that threaten the stability of peace.

Keywords: peace, reconciliation, interfaith, Islam and Christianity, Team 20.

Abstrak: Agama merupakan solusi problematika sosial masyarakat, perdamaian merupakan tujuan agama diturunkan ke dunia. Namun dalam realitasnya kehidupan beragama tidak lepas dari pertikaian yang berakibat pada dan perang pertumpahan darah. Penelitian ini mengkaji rekonsiliasi antar pemeluk agama (Kristen dan Islam) pada konflik berdarah di Ambon Maluku tahun 1999-2000. Metode yang digunakan

ialah deskriptif kualitatif dan pendekatan antropologi sosial dengan sentuhan relasi antar agama dalam rekonsiliasi untuk perdamaian. Penelitian ini didasarkan pada kajian Islam perifer yang menekankan pada lokalitas wilayah konflik yang pinggiran dan lokal seperti di Ambon. Artikel ini difokuskan pada Tim 20 Wayame yang bergerak dalam upaya rekonsiliasi perdamaian antar agama di Ambon yang melibatkan dua kelompok agama yang bertikai (Muslim dan Kristiani). Berbagai upaya rekonsiliasi yang dilakukan Tim 20 antara lain: *Pertama*, membentuk anggota berimbang dari unsur Islam dan Kristen dalam satu tim. *Kedua*, aktif mengadakan dialog antar agama pada setiap ada insiden kerusuhan di kota Ambon sebagai evaluasi dan antisipasi dini. *Ketiga*, membuat 4 (empat) aturan yang harus dipatuhi oleh umat Kristiani dan Muslim lengkap dengan sanksi dan hukuman fisik bagi masyarakat yang melanggar. *Keempat*, aktif melakukan dialog silang antar agama yang dilakukan oleh Tim 20 dengan warga sebagai upaya mendeteksi dini pengaruh dari luar yang dapat menimbulkan benih-benih permusuhan. *Kelima*, mengadakan kerja sama dengan pihak militer TNI sebagai pengawasan dan pelindung masyarakat dari pengaruh luar yang mengancam stabilitas kedamaian.

Kata kunci: perdamaian, rekonsiliasi, antar agama, Islam dan Kristen, Tim 20.

Pendahuluan

Semua agama telah sepakat bahwa perdamaian merupakan tujuan utama diturunkannya agama ke muka bumi, walaupun ekspektasi ini menurut Weigel (1991) sangat kompleks¹, akan terus ada pertikaian², perang³, terorisme⁴ yang diatasnamakan agama. Namun agama merupakan jaminan terkuat solusi perdamaian di muka bumi, berbagai upaya dilakukan pada kasus agama sebagai pendomplengan perpecahan seperti mediasi dan rekonsiliasi yang diprakarsai oleh para pelaku agama⁵. Seperti kasus upaya jalinan perdamaian Gereja Ortodoks di Rusia⁶; kesepakatan damai Addis Ababa

¹ George Weigel, "Religion and Peace: An Argument Complexified," *The Washington Quarterly* 14, no. 2 (1 Juni 1991): 27–42, <https://doi.org/10.1080/01636609109477678>.

² A. Ndiaye, "Religion, faith and toleration," *Diogenes* 56, no. 4 (2009), <https://doi.org/10.1177/0392192110365291>.

³ James B. Bell, *A War of Religion* (United States: Springer, 2008).

⁴ Magnus Ranstorp, "Terrorism in the Name of Religion," *Journal of International Affairs* 50, no. 1 (1996): 41–62.

⁵ Scott R. Appleby, *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation* (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1999).

⁶ Katrien Hertog, "Religious Peacebuilding: Resources and Obstacles in the Russian Orthodox Church for Sustainable Peacebuilding in Chechnya," *KU Leuven*, Mei 2008, <https://lirias.kuleuven.be/1862904>.

tahun 1972 di Sudan⁷; proses negosiasi damai di Thailand Selatan⁸; resolusi konflik di Eropa Timur⁹; gerakan pembebasan hak asasi manusia di Amerika Latin¹⁰; gerakan pembebasan rakyat di Tibet¹¹; dan seruan rakyat menghendaki perubahan bentuk negara Myanmar ke demokrasi¹².

Dalam konteks relasi antar agama, beberapa gereja dan kelompok Muslim berada di garis terdepan di Afrika Selatan berjuang melawan apartheid untuk proses perdamaian atas nama agama¹³. Begitu juga konflik agama yang terjadi di Mindanao Filipina, peran tokoh antar agama Katolik dan Islam dalam proses negosiasi perang saudara yang diakibatkan oleh gesekan kelompok separatis sejak dekade akhir 1960-an¹⁴. Tragedi yang paling dikenal sepanjang sejarah ialah keberhasilan mediator Komunitas Sant 'Egidio di Roma untuk membantu mengakhiri konflik perang saudara di Mozambik pada tahun 1992.¹⁵

⁷ S. Poggio, *The First Sudanese Civil War: Africans, Arabs, and Israelis in the Southern Sudan, 1955-1972* (New York: Springer, 2008), 1955–72.

⁸ Rungrawee Chalermripinyorat, "Dialogue Without Negotiation: Illiberal Peace-Building in Southern Thailand," *Conflict, Security & Development* 20, no. 1 (2 Januari 2020): 71–95, <https://doi.org/10.1080/14678802.2019.1705069>; Anders Engvall dan Isak Svensson, "Peace Talks and Valid Spokespersons: Explaining the Onset of Negotiations in Southern Thailand," *International Negotiation* 25, no. 3 (17 Agustus 2020): 495–518, <https://doi.org/10.1163/15718069-25131248>; Duanghathai Buranajaroenkij (she/her/hers), "Challenges to Women's Inclusion in Peace Processes in Thailand and Myanmar," *International Feminist Journal of Politics* 22, no. 3 (26 Mei 2020): 403–22, <https://doi.org/10.1080/14616742.2019.1698973>.

⁹ Ilana Shapiro, "Beyond Modernization: Conflict Resolution in Central and Eastern Europe," *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 552, no. 1 (1 Juli 1997): 14–27, <https://doi.org/10.1177/0002716297552001002>; Helga A. Welsh, "Political Transition Processes in Central and Eastern Europe," *Comparative Politics* 26, no. 4 (Juli 1994): 379, <https://doi.org/10.2307/422022>.

¹⁰ Mark Burton dan Carolyn Kagan, "Liberation Social Psychology: Learning from Latin America," *Journal of Community & Applied Social Psychology* 15, no. 1 (1 Januari 2005): 63–78, <https://doi.org/10.1002/casp.786>.

¹¹ Christopher S. Queen dan Sallie B. King, *Engaged Buddhism: Buddhist Liberation Movements in Asia* (Albany: SUNY Press, 1996).

¹² Marte Nilsen, "Will Democracy Bring Peace to Myanmar?," *International Area Studies Review* 16, no. 2 (1 Juni 2013): 115–41, <https://doi.org/10.1177/2233865913492961>.

¹³ Vahed Goolam, "Islam in the Public Sphere in Post-Apartheid South Africa: Prospects and Challenges," *Journal for Islamic Studies* 27, no. 1 (1 Januari 2007): 116–49, <https://doi.org/10.10520/EJC47138>; Johan D. van der Vyver, "Constitutional Perspective of Church-State Relations in South Africa," *Brigham Young University Law Review* 1999 (1999): 635.

¹⁴ Peter Chalk, "Separatism and Southeast Asia: The Islamic Factor in Southern Thailand, Mindanao, and Aceh," *Studies in Conflict & Terrorism* 24, no. 4 (1 Juli 2001): 241–69, <https://doi.org/10.1080/10576100116748>.

¹⁵ Cameron R. Hume dan Richard Syge, *Ending Mozambique's War: The Role of Mediation and Good Offices* (Washington: US Institute of Peace Press, 1994); Veronique Dudouet, Hans

Pada realitasnya, Indonesia juga telah mengalami berbagai cobaan perpecahan dan upaya perdamaian atas nama agama, tepatnya di Poso Sulawesi Tengah tahun 2001 (perjanjian perdamaian Malino I) dan di Ambon Maluku tahun 2002 perjanjian perdamaian Malino II) merupakan sebuah buah dari usaha yang tak mengenal lelah yang dilakukan pelaku agama antara Muslim dan Kristen yang bekerja sama untuk mewujudkan sebuah usaha kecil perdamaian. Kedua agama ini (Islam dan Kristen) melakukan hubungan kerja sama dengan pihak pemerintah dan fraksi masyarakat sipil untuk melakukan perjanjian damai atas nama agama¹⁶. Seperti yang diketahui bahwa para pemuka agama terlibat aktif dalam upaya negosiasi untuk mencapai kesepakatan damai dan yang lebih menarik ialah inisiatif tersebut justru diprakarsai oleh masyarakat yang terkena dampak perselisihan, bukan dari prakarsa lembaga besar baik nasional maupun internasional. Terlepas dari realitas tersebut, beberapa ilmuwan telah memberikan kontribusinya dalam upaya rekonsiliasi pada kasus kekerasan dan konflik agama pasca Suharto seperti Aspinal dan Fealy (2003)¹⁷, Colombijn dan Lindblad (2002)¹⁸, Ling Chong Wu (2007)¹⁹, Klinken dan Schulte Nordholt (2007)²⁰. Kontribusi para ilmuwan dalam usaha rekonsiliasi perdamaian atas nama agama belum mencapai klimaks, alasannya setiap konflik yang terjadi berakar dari hal yang sama yakni diskriminasi dan isu rasisme namun tidak dipahami dengan baik oleh yang berselisih, walaupun solusi sudah dinegosiasikan sejak awal.

Artikel ini mengisi kekosongan yang belum banyak diteliti oleh para ahli lainnya, di mana kasus di Ambon merupakan konflik antar agama di mana kedua agama yang terlibat ini (Islam dan Kristen) bersama-sama membangun sebuah penandatanganan perjanjian damai dan mengeksplorasi dialog antar agama yang bersitegang mempertahankan eksistensi wilayah keagamaannya. Penelitian ini didasarkan pada kajian Islam perifer²¹ yang menekankan pada

Giessmann, dan Katrin Planta, *Post-War Security Transitions, Post-War Security Transitions*, 1st Edition (London: Routledge, 2012), <https://doi.org/10.4324/9780203127469-23>.

¹⁶ Laskar Jihad-Islam Noorhaidi, "Militancy and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia" (PhD Thesis, PhD Dissertation (Leiden, 2005), 2005); Kirsten E. Schulze, "Laskar Jihad and the Conflict in Ambon," *The Brown Journal of World Affairs* 9, no. 1 (2002): 57–69.

¹⁷ E. Aspinal dan Greg Fealy, "Local Power and Politics in Indonesia," *Decentralisation and democratization. Indonesia update series. Research school of Pacific and Asian studies, Australian National University*, 2003, 259–74.

¹⁸ Freek Colombijn dan J. Thomas Lindblad, *Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective*, vol. 194 (Leiden: KITLV Press, 2002).

¹⁹ Chong Wu Ling, "Violence, Conflict and Security in Archipelagic Southeast Asia," *Asian Ethnicity* 8, no. 2 (1 Juni 2007): 181–86, <https://doi.org/10.1080/14631360701406304>.

²⁰ Van Klinken dan Henk Schulte Nordholt, *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia* (Leiden: KITLV Press, 2007).

²¹ Kajian Islam Indonesia merupakan wilayah penelitian yang tergolong unik, karena penelitian ini mengungkap Islam dari sisi Lihat dalam Testriono Testriono, "Is Indonesian

lokalitas wilayah konflik yang pinggiran dan lokal yakni di Ambon. Studi-studi tentang rekonsiliasi perdamaian antar agama di wilayah pinggiran sangat rentan dengan perpecahan, seperti temuan Ginty (2015) bahwa wilayah lokal sering dijadikan objek perpecahan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, namun upaya masyarakat lokal bangkit dan mempertahankan keutuhan perdamaian sangat jarang ditemui²², seperti di Ambon. Dialog antar agama ini sengaja dirancang untuk memberikan kebebasan memilih bagi Muslim dan Kristiani apakah mereka ingin hidup berdampingan bersama atau memisahkan diri dan membuat pemukiman baru dalam sewilayah seagama.

Dalam rekonsiliasi ini, mediasi sebagai langkah pertama untuk proses reunifikasi²³. Saat itu, kedua agama masing-masing membuat tim rekonsiliasi atas saran dari pemerintah daerah dan militer seperti TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan POLRI (Polisi Republik Indonesia). Tim yang dibentuk berasal dari unsur pemimpin agama, tokoh adat, dan perwakilan pemuda yang bertujuan untuk memfasilitasi dialog dan proses rekonsiliasi, serta untuk mengajak seruan pengungsi dari kedua agama untuk kembali ke Ambon. Tim ini dianggap berhasil karena di bulan pertama mereka mampu memfasilitasi dialog antar kedua agama untuk rekonsiliasi dan membangun kepercayaan pada pihak yang bertikai. Di wilayah Tobelo dan Galela, komunitas Kristiani dan Muslim bersama-sama membahu merekonsiliasi dengan upaya dialog serta memperbaiki hubungan yang bersitegang selama bertahun-tahun walaupun tanpa adanya bantuan atau campur tangan pihak ketiga seperti LSM (Lembaga Swadaya) Internasional maupun dari pihak pemerintah daerah²⁴.

Artikel ini memfokuskan pada tim yang bergerak dalam upaya rekonsiliasi perdamaian antar agama di Ambon yang melibatkan dua kelompok agama yang bertikai (Muslim dan Kristiani). Tim tersebut memiliki prinsip dan pendekatan yang berbeda dalam peran mereka sebagai *rekonsilers*. Tim 20 Wayame yang beranggotakan 20 orang yang terdiri dari 10 orang rekonsiler Kristiani dan 10 orang rekonsiler Muslim yang berasal dari Wayame, Ambon. Tim 20 Wayame mempunyai perwakilan rekonsiler yang melibatkan tokoh agama dan penduduk desa setempat. Baik Kristen maupun Islam, kedua kelompok agama ini sama-sama berupaya menjembatani

Islam Different? Islam in Indonesia in a Comparative International Perspective,” *Studia Islamika* 18, no. 1 (2011), <https://doi.org/10.15408/sdi.v18i1.445>.

²² Roger Mac Ginty, “Where Is the Local? Critical Localism and Peacebuilding,” *Third World Quarterly* 36, no. 5 (4 Mei 2015): 840–56, <https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1045482>.

²³ Christopher R. Duncan, “The Other Maluku: Chronologies of Conflict in North Maluku,” *Indonesia*, no. 80 (2005): 53–80; Moch Khafidz Fuad Raya, “Resolusi Konflik Dalam Institusi Pendidikan Islam (Kajian Empirik Dan Potensi Riset Resolusi Konflik),” *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 1, no. 1 (2 Oktober 2016): 71–85, <https://doi.org/10.35316/jpii.v1i1.38>.

²⁴ Carmen S. Lowry dan Stephen Littlejohn, “Dialogue and the Discourse of Peacebuilding in Maluku, Indonesia,” *Conflict Resolution Quarterly* 23, no. 4 (1 Juni 2006): 409–26, <https://doi.org/10.1002/crq.147>.

rekonsiliasi antar pihak yang bertikai dengan mencari pemecahan masalah yang solutif. Keseimbangan anggota kelompok rekonsilers ini merupakan lambang keadilan dan persatuan dalam beragama. Melihat metode dan pendekatan rekonsilers, upaya yang dilakukan mengikuti pola Susan Allen dan Strimling (2006) yakni pembangunan perdamaian melalui koordinasi dan resolusi konflik.²⁵

Melalui media rekonsilers, artikel ini berusaha membahas kesenjangan bahwa umat Kristiani dan Muslim di Ambon yang bertikai mampu memanfaatkan ancaman menjadi sebuah kekuatan untuk menggalang persatuan dan menghindari konflik perifer yang berkepanjangan, serta membuka ruang baru dalam dialog antar agama. Artikel ini juga membuka relung-relung yang belum diteliti dalam pembangunan perdamaian pada konflik antar agama dengan memanfaatkan sumber daya manusia lokal untuk mencapai rekonsiliasi tersebut, walaupun berada di wilayah pinggiran dan jauh dari perhatian pemerintah dan lembaga internasional.

Pertikaian Antar Agama di Ambon

Merujuk temuan Jacques Bertrand (2002) bahwa pertikaian agama di Maluku merupakan pengalaman pertama Indonesia mengalami kerusuhan Kristen-Muslim dalam skala besar²⁶. Pasca lengsernya rezim Suharto tahun 1998, Indonesia bukan hanya dilanda krisis ekonomi, tetapi juga krisis sosial keagamaan dan terjadi insiden kekerasan etnis-agama, menguatkan kelompok sektarian, dan kerusuhan massal yang terjadi di sejumlah daerah²⁷. Dari semua konflik yang melanda pasca-Suharto, konflik di Ambonlah yang paling berdampak ribuan korban jiwa dalam skala kematian dan luka-luka. Diperkirakan setengah dari populasi penduduk di Ambon mengungsi ke Jawa serta kerusakan fasilitas publik dan rumah-rumah penduduk hancur. Konflik dan kerusuhan antar agama di Ambon merupakan tragedi yang paling mengejutkan bagi publik di Indonesia²⁸.

²⁵ Susan Allen Nan dan Andrea Strimling, "Coordination in Conflict Prevention, Conflict Resolution and Peacebuilding," *International Negotiation* 11, no. 1 (1 Januari 2006): 1–6, <https://doi.org/10.1163/157180606777835784>.

²⁶ Jacques Bertrand, "Legacies of the Authoritarian Past: Religious Violence in Indonesia's Moluccan Islands," *Pacific Affairs* 75, no. 1 (2002): 57, <https://doi.org/10.2307/4127241>.

²⁷ Mohammad Zulfan Tadjoeddin dkk., "Inequality and Violent Conflict: New Evidence from Selected Provinces in Post-Soeharto Indonesia," *Journal of the Asia Pacific Economy* 0, no. 0 (31 Mei 2020): 1–22, <https://doi.org/10.1080/13547860.2020.1773607>.

²⁸ Adam Jeroen, "Communal Violence, Forced Migration and Social Change on the Island of Ambon, Indonesia" (PhD Thesis, Belgia, Ghent University, 2009); Jacques Bertrand, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004); Sandra Pannell, "Violence, Society and the State in Eastern Indonesia: Context," dalam *A State of Emergency: violence, society and the state in Eastern Indonesia*, ed. oleh Sandra Pannell (Darwin, NT, Australia: Northern Territory University Press, 2003), 11–36, <https://researchonline.jcu.edu.au/7301/>; Patricia Spyer, "Fire without Smoke and Other

Munculnya konflik antar dua agama setelah mencuatnya proyek Kristenisasi dan Islamisasi selama kurun waktu masa penjajahan Belanda (1850-1942) sampai berkuasanya rezim Soeharto (1966-1988). Prasangka dan kecurigaan antara kedua agama tersebut berkembang secara berkelindan menimbulkan ketegangan hubungan antar kedua agama selama periode tersebut²⁹. Ketegangan tersebut akhirnya menimbulkan benih pertikaian di berbagai daerah seperti pada kelompok etnis lokal antara penganut Kristen Protestan Calvin dengan Muslim penduduk asli di Ambon dan Maluku Utara pada awal 1999 yang berlangsung selama kurang lebih lima tahun³⁰.

Ledakan pertikaian tersebut terjadi sebenarnya dipicu oleh perkara kecil saling “cekcok” di sebuah terminal bus di kota Ambon antar dua penganut agama yang berujung pada kekerasan komunal yang melibatkan kelompok agama saling bertikai. Sosiolog Belanda Van Klinken menemukan bahwa kemarahan dua orang ini kemudian dibawa kepada komunitas kelompoknya sehingga benih permusuhan cepat tersebar ke berbagai wilayah-wilayah yang terdapat masing-masing komunitas tersebut³¹. “Adu mulut” antar personal dari penganut agama mengaktifkan sentimen simbol-simbol agama secara komunal yang membingkai perselisihan³².

Kekerasan yang mengaitkan simbol agama sebagai pemicunya sebenarnya sudah ditutup dengan sistem budaya *Pela* dan *Ambon Manise* sebagai tradisi persaudaraan antar kelompok masyarakat³³. Namun apa yang terjadi di Maluku adalah sebaliknya. Konflik pecah dan menjadi perang dengan skala besar dan mematikan serta menimbulkan kegaduhan sosial di seluruh wilayah Indonesia. Datangnya kelompok jihad seperti *Laskar Mujahidin*, *Hizbullah*, *Jama'ah Islamiyah*, dan *Laskar Jihad*³⁴ ke Ambon

Phantoms of Ambon's Violence: Media Effects, Agency, and the Work of Imagination,” *Indonesia* 74 (Oktober 2002): 21, <https://doi.org/10.2307/3351523>; Gerry van Klinken, “The Maluku Wars: Bringing Society Back In,” *Indonesia* 71 (April 2001): 1, <https://doi.org/10.2307/3351455>.

²⁹ Alexander R. Arifianto, “Explaining the Cause of Muslim-Christian Conflicts in Indonesia: Tracing the Origins of Kristenisasi and Islamisasi,” *Islam and Christian-Muslim Relations* 20, no. 1 (1 Januari 2009): 73–89, <https://doi.org/10.1080/09596410802542144>.

³⁰ Barbara Watson Andaya, *Islam and Christianity in South-East Asia 1600-1700, Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History Volume 11 South and East Asia, Africa and the Americas (1600-1700)* (Leiden: Brill, 2017), 1600–1700, https://doi.org/10.1163/9789004335585_003.

³¹ Gerry van Klinken, *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars* (London: Routledge, 2007).

³² Joseph G. Bock, “Communal Conflict, NGO's, and the Power of Religious Symbols,” *Development in Practice* 7, no. 1 (1 Februari 1997): 17–25, <https://doi.org/10.1080/09614529754729>.

³³ Resa Dandirwalu, “Totem Ambon Manise: Membongkar Segregasi Teritorial Berbasis Agama Di Kota Ambon,” *Antropologi Indonesia*, 11 Oktober 2016, 30–44, <https://doi.org/10.7454/ai.v35i1.5511>.

³⁴ Schulze, “Laskar Jihad and the Conflict in Ambon.”

merupakan bentuk segregasi sosial keagamaan yang meniadakan persaudaraan dan menambah “sekat” persatuan³⁵.

Hipotesa Arifianto (2009) di atas rupanya dapat diterima bahwa kedatangan para jihadis ke Ambon menggambarkan adanya rasa kecurigaan mendalam dan tanggapan sentimentil sebagai pemicu perang suci melawan konspirasi Kristenisasi dan Zionisasi yang dipimpin oleh negara liberal seperti Amerika dan Israel. Rupanya pola ini sebaliknya terjadi pada datangnya kelompok elit Kristen Aceh yang bercorak radikal (seperti Kuda Putih) menunjukkan adanya cara bipolar yang sama yang bernada sentimen pada umat Islam sebagai “biang kerok” pertikaian atas nama dominasi politik, ekonomi, kebijakan publik, dan budaya lokal atas Muslim³⁶.

Dari kubu Muslim jihadis terbagi menjadi dua kelompok. Pertama dari kelompok Muslim lokal Ambon baik yang pendatang ataupun pribumi, mereka mempunyai kelompok jihadis sendiri yang secara kolektif perekrutannya dilakukan dengan sukarela dan ajakan dari tokoh adat tiap desa yang disebut Pasukan Jihad. Sedangkan dari kelompok kedua dari jihadis radikal yang datang dari Jawa atau penduduk non-Ambon yang bergabung dalam militansi Laskar Jihad yang dipimpin oleh Ja'far 'Umar Thalib dan “sempalan” dari kelompok ini seperti Laskar Mujahidin, Jama'ah Islamiyah, KOMPAK, dan Darul Islam³⁷. Kehadiran kelompok kedua ini menimbulkan eskalasi baru kekerasan dan radikalisme dalam Islam dan menghidupkan kembali kekuatan militer Muslim yang lebih memilih jalan perang daripada mengabaikan rekonsiliasi perdamaian. Setelah kedatangan kelompok jihadis dari Jawa ini, kelompok Muslim jihadis lokal bergabung dengan Laskar Jihad dengan sejumlah aksi penyerbuan terhadap Kristen. Sedangkan dari kubu Kristen sendiri, kelompok lebih didominasi oleh penduduk asli Ambon yang terhubung dengan Gereja Protestan Maluku yang merupakan aliansi jemaat Kristen terbesar di Provinsi Maluku. Kedua kubu ini saling berperang dengan melakukan sejumlah perusakan, penjarahan, perebutan wilayah, dan bahkan pembunuhan.

Sejak berawal dari insiden kecil di terminal bus tersebut, kelompok jihadis dari Muslim lokal Ambon bekerja sama dengan kelompok jihadis non-Ambon untuk memperkuat kelompoknya melawan pejuang Kristen yang bertujuan memberantas gerakan separatis sekelompok orang Kristen yang mencoba menghidupkan kembali gerakan Republik Maluku Selatan yang

³⁵ KIRSTEN E. SCHULZE, “From Ambon to Poso: Comparative and Evolutionary Aspects of Local Jihad in Indonesia,” *Contemporary Southeast Asia* 41, no. 1 (2019): 35–62.

³⁶ Muhammad Najib Azca, “After Jihad: a Biographical Approach to Passionate Politics in Indonesia” (PhD Thesis, Netherlands, University of Amsterdam, 2011); Noorhaidi, “Militancy and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia.”

³⁷ Azca, “After Jihad: a Biographical Approach to Passionate Politics in Indonesia”; Noorhaidi, “Militancy and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia.”

tujuannya tidak lain untuk mendirikan negara merdeka dari Indonesia. Mengingat kekuatan Kristen yang tidak mudah untuk dilawan, maka dari sini masuklah jihadis dari kalangan radikal untuk mempersenjatai kelompok Muslim lokal. Seperti kasus di Mindanao Filipina di mana kelompok separatist mendapat sejumlah dukungan dari gerakan Islam radikal seperti ISIS untuk mempersenjatai mereka melakukan pemberontakan³⁸.

Dapat dipastikan bergabungnya Laskar Jihad dan Laskar Mujahidin dalam pertikaian berdarah atas nama agama menunjukkan adanya keterlibatan badan-badan internasional yang berideologi radikal untuk mengambil kesempatan di wilayah konflik. Laskar Jihad yang dimotori oleh gerakan Salafi-Wahabi dan Laskar Mujahidin yang berafiliasi pada al-Qaeda. Beberapa veteran Perang Afghanistan juga bergabung dengan kamp-kamp di Ambon dengan gencar melakukan serangan kepada kubu Kristen. Menguatnya kelompok sepratis agama trans-nasional jihadis menjadi bukti tentang pentingnya menjaga kestabilan sosial keagamaan pada wilayah-wilayah yang rentan terhadap gesekan isu agama. Ambon yang sebelumnya stabil menjadi wilayah berpotensi perang etnis agama.

Baik kubu Muslim maupun Kristen keduanya saling berebut pengaruhnya dengan gagasan dan wacana teks agama untuk mencari legitimasi agama atas tindakan perang melawan musuh. Seperti militansi Kristen berusaha mencari “ayat pembenaran” untuk tindakan mereka menyerang pemeluk agama lain dengan mengutip pada sejumlah ayat di Perjanjian Lama yang menceritakan perang antara kaum Israel seperti Daud, Sulaiman, Saul melawan musuhnya, dan beberapa kejadian heroik seperti perang salib, Konstantinus, dan Agustinus. Sedangkan dari fraksi Kristen yang menghendaki perdamaian, rekonsiliasi yang dibangun dengan menukil kembali narasi Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru yang mengajarkan cinta “Kasihlanilah musuhmu” dalam Matius 5.44. Rupanya fraksi inilah yang mendorong gerakan non-kekerasan untuk kembali merekonsiliasi hubungan antara Muslim-Kristen.

Begitu juga dengan Muslim yang pro-perdamaian mereka mengaitkan pembangunan hubungan baik dengan mengaitkan teks-teks agama dalam al-Qur'an dan Hadith yang berkaitan dengan rekonsiliasi, arbitrase, toleransi, dan plurarisme. Kelompok ini juga mencari pembenaran dari sejumlah perilaku damai Nabi Muhammad Saw terhadap non-Muslim yang memerangi beliau dan bahkan mencoba melakukan pembunuhan terhadap beliau³⁹. Gagasan tentang “anti perang” sebenarnya sudah tertanam pada kedua agama. Baik

³⁸ Andrew Tan, “Armed Muslim Separatist Rebellion in Southeast Asia: Persistence, Prospects, and Implications,” *Studies in Conflict & Terrorism* 23, no. 4 (1 Oktober 2000): 267–88, <https://doi.org/10.1080/10576100050174986>.

³⁹ Martin Lings, “Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources. 1983,” *Rochester, Vt Inner Traditions International*, 2006.

dari kubu Muslim maupun Kristen telah sepakat bahwa perdamaian adalah tujuan mutlak didirikan negara Indonesia. Kelompok yang berhaluan seperti ini berasal dari Ambon yang mencoba menginisiasi gagasannya tentang reintegrasi agama dengan praktik tradisi budaya Muslim-Kristen melalui dialog budaya seperti *pela*, *gadong*, dan *baku bae*⁴⁰, yang mereka anggap sebagai budaya dan tradisi Islam Maluku yang menjunjung tinggi persaudaraan dan kekeluargaan dengan saudara lain agamanya.

Realitas di atas menunjukkan bahwa sejak terjadinya pecah perang Ambon, citra Ambon sebagai wilayah konflik dan berdarah telah mengakar di masyarakat. Kisha Ambon bukan hanya tentang perang yang mengerikan, tetapi juga tentang realitas perdamaian yang luar biasa dan harus diungkap. Ada realitas lain seperti rekonsiliasi dan reintegrasi yang menjadi sorotan dunia internasional bahwa dua agama (Islam dan Kristen) telah mampu memprakarsai dialog antaragama dan mengadakan pertemuan kelompok serta mencari solusi damai dengan menggunakan akar agama dan hukum adat dan tradisi lokal sebagai mediasi untuk mencapai kesepakatan damai.

Dalam artikel ini akan disajikan beberapa bagian dalam konflik antar agama di Ambon. Penulis membagi dalam 4 (empat) bagian;

Bagian I: Peristiwa Sepele (Januari-Maret 1999)

Peristiwa ini terjadi karena masalah sepele bahkan dianggap lumrah oleh masyarakat. Pertikaian antara sekelompok preman Batumerah dari pihak Muslim dengan Mardika dari pihak Kristen. Menurut Qurtuby (2013) kejadian sepele tersebut terjadi di dalam bus mini antara seorang supir Kristen yang bernama Jakob Lauhery dari Mardika dengan seorang penumpang Muslim Bugis yang bernama Nur Salim dari Batumerah. Terdapat dua versi awal mengapa insiden sepele ini terjadi. *Pertama*;

“Supir Kristen yang bernama Yopi (panggilan untuk Jakob Lauhery) menjadi korban penodongan oleh dua orang Bugis Muslim yang di antaranya adalah Nur Salim. Dalam versi ini, Yopi menarik angkotnya di terminal Batumerah dan Nur Salim meminta uang Rp. 500, namun Yopi menolak. Setelah berkeliling akhirnya Yopi tidak mendapat penumpang satu orang pun dan Yopi kembali ke terminal Batumerah, dan sekali lagi Nur Salim meminta uang dan Yopi menasehati Nur Salim agar tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian Nur Salim mengancam dengan mengeluarkan pisau dan mengarahkannya ke leher Yopi. Sontak Yopi melawan Nur Salim berserta temannya dan lari ke desa Mardika. Setelah itu Yopi kemudian mengambil pisau badik yang diikuti oleh segerombolan temannya dari Mardika untuk mencari Nur

⁴⁰ Frank Leonard Cooley, *Altar and Throne in Central Moluccan Societies: A Study of the Relationship Between the Institutions of Religion and the Institutions of Local Government in a Traditional Society Undergoing Rapid Social Change* (Yale University, 1961).

Salim. Namun Salim sudah tidak ada di sana, kemudian beberapa waktu kemudian ratusan Muslim dari Batumerah datang ke rumah Yopi dan terjadilah pertengkaran sengit antara gerombolan Yopi dengan gerombolan Nur Salim dari Batumerah”.⁴¹

Sedangkan versi *kedua*, konflik Ambon diawali dari:

“Nur Salim seorang pemuda dari Batubara yang menjadi kernet bus mini yang dikemudikan oleh supir Yopi. Angkutan kota tersebut adalah milik Nur Salim, dan bus tersebut sebelumnya telah dipakai oleh Yopi untuk kepentingan pribadi (menyewakannya kepada orang lain). Nur Salim kemudian menanyakan perihal tersebut dan Yopi menolak memberikan uang sewa kepada Nur Salim, akhirnya terjadilah cekcok mulut dan Nur Salim lari ke Batubara untuk meminta bantuan teman-temannya. Begitu juga sebaliknya, Yopi juga membawa segerombolan temannya dari Mardika, sehingga terjadilah bentrokan antar kedua kelompok warga ini”.⁴²

Versi pertama adalah klaim dari Tim Pengacara Gereja dan versi kedua adalah klaim dari Tim Pencari Fakta Muslim Ambon. Kedua versi ini memiliki legitimasi masing-masing yang mampu menarik persuasif masyarakat untuk melakukan tindakan kerusuhan. Pertengahan Januari 1999 pertikaian ini menimbulkan gelombang kerusuhan besar bahkan meluas sampai ke seluruh wilayah Ambon dan menimbulkan banyak korban jiwa serta kerusakan besar. Sebanyak 100.000 ribu orang mengungsi dan hanya menyisakan 20.000 orang saja dan terpaksa juga membuat kamp pengungsian lebih dari 34 lokasi. Kondisi kota Ambon yang porak-poranda akibat kerusuhan yang hampir setiap hari terjadi, masjid dan gereja rusak, rumah dan toko yang dibakar, serta banyak fasilitas publik yang dijarah membuat kota ini mencekam selama beberapa bulan.

Wilayah Ambon kemudian terbagi menjadi 2 (dua), yakni “Merah” untuk Kristen, dan “Putih” untuk Islam. Keadaan masyarakat yang terpisah ini juga disekat identitas kedua warna ini, misalnya ada pelabuhan merah dan putih, ada pasar merah dan putih, ada bank merah dan putih, ada sekolah merah dan putih, ada toko merah dan putih, dan sebagainya. Keadaan seperti ini baru mereda pada akhir Juli 1999 meskipun masih ada insiden kerusuhan di beberapa tempat. Inisiasi rekonsiliasi yang dilakukan pihak keamanan dan pemerintah daerah sudah dilakukan, namun mencapai jalan buntu ketika Ambon memasuki masa pemilu.

Bagian II: Milisi Jihad-Kristus (Juli-November 1999)

⁴¹ Robertus (anggota Tim Pengacara Gereja), wawancara dengan penulis.

⁴² Ahmad MF (saksi pada Tim Pencari Fakta Muslim Ambon, wawancara dengan penulis

Ketenangan yang dirasakan rakyat Ambon hanya sesaat, setelah itu Indonesia memasuki masa pemilu setelah 13 (tiga belas) bulan masa kekuasaan presiden B.J. Habibie pasca rezim Suharto runtuh. Masa kampanye disusupi oleh kepentingan kelompok tertentu untuk menghasut masyarakat agar lebih mengganas, saat seperti ini status keamanan wilayah berubah menjadi kodam. Hasutan demi hasutan dilancarkan oleh masing-masing yang bertikai sehingga menimbulkan segregasi masyarakat yang tensinya lebih tinggi. Walaupun di daerah Tual mereda, namun di daerah Poka ketegangan tersebut kembali pecah sampai ke Maluku Utara.

Saat itu, lokasi yang menjadi titik pengungsian terbagi atas 123 titik untuk Kristiani dan 119 titik untuk Muslim, namun masih ada 1 daerah yang masyarakatnya tetap membaaur satu sama lain yaitu di Wayame. Tensi konflik semakin memanas ketika masyarakat semakin mempersenjatai diri dengan berbagai senjata seperti parang, pistol, senjata rakitan, dan berbagai bom. Milisi juga sudah bermunculan, mulai dari Agas (milisi dari kalangan anak-anak), Linggis (milisi dari kalangan remaja), Laskar Jihad (milisi dari kalangan dewasa Muslim) dan Laskar Kristus (milisi dari kalangan dewasa Kristen). Hari-hari dijalani masyarakat hanyalah membuat senjata dan sebisa mungkin mendapatkan senjata secara ilegal dari berbagai pihak. Di bagian ini sebutan Merah berubah menjadi Obet (dari asal Robert) untuk Kristen, dan sebutan Putih menjadi Acang (dari asal Hasan) untuk Islam.

Bagian III: "Sesak Pengungsi" (Akhir Desember 1999-Pertengahan Januari 2000)

Bulan Desember 1999 bertepatan dengan bulan Ramadhan 1420 H menjadi momentum pereda ketegangan antar umat beragama. Namun hal ini tidak berlangsung lama setelah tersiar kabar bahwa presiden KH. Abdurrahman Wahid dan wakil presiden Megawati Soekarnoputri akan berkunjung ke Ambon. Kesiagaan makin meningkat antar kedua belah pihak, terutama di pulau Buru dan pulau Seram. Kerusuhan pecah di Batumerah pada tanggal 20 Desember 1999. Kerusuhan akhirnya meluas dari Masohi, Namlea, sampai ke Maluku Tengah. Setelah itu di awal tahun 2000, segregasi masyarakat pecah di Haruku dan Saparua yang menyebabkan banyak korban jiwa dan pengungsi meningkat tajam. Arus pengungsi semakin deras mulai dari Pulau Buru ke Ambon, ke Maluku Tenggara, dan dari pulau Seram ke Sorong Papua. Kemudian arus pengungsi dari Maluku Utara (seperti pulau Bacan, pulau Obi, dan sebagian Halmahera Utara). Pada bagian ini, Ambon menjadi lautan manusia yang penuh sesak dengan pengungsi akibat konflik kerusuhan antar agama.

Bagian IV: Utopia Damai (Februari-April 2000)

Sebenarnya pasca arus pengungsi Ambon pada bulan Januari, ketegangan sudah mulai reda, ditandai dengan dibukanya jalan yang diblokir

dan fasilitas publik yang dikuasai oleh dua kelompok yang bertikai. Seperti pada bagian ketiga, kondisi ini tidak berlangsung lama kerusuhan mulai kembali pasca kunjungan wakil presiden Megawati Soekarnoputri ke Ambon pada momen “Makan Patita” antara pihak Muslim Batumerah dengan pihak Kristen Kudamati yang diawali dengan pawai becak. Setelah itu kerusuhan muncul di mana-mana diantaranya seperti di Laha Tawiri. Seruan jihad dari kelompok Muslim dan Kristen mulai digaungkan ke berbagai tempat, sehingga korban jiwa banyak berjatuhan. Pemblokiran fasilitas publik seperti bandara untuk mengangkut bantuan dari luar Ambon juga dijarah dan disabotase, kondisi Ambon makin tidak terkendali dan sikap apatisme terhadap agama sebagai bentuk peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari masyarakat mulai muncul, sehingga bagaimana bertahan hidup adalah tujuan utama masyarakat Ambon.

Konflik di Ambon menjelma menjadi sebuah konspirasi keagamaan sebagai upaya “perang suci” melawan Zionis dan Krsitenisasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat sehingga menarik sejumlah kelompok jihadis seperti Laskar Jihad, Laskar Mujahidin, Hizbullah, dan Jama’ah Islamiyah datang ke Ambon untuk melakukan jihad menumpas orang Kristen, tentu saja hal ini menambah ketegangan di Ambon. Sementara itu, kelompok radikal Kristen di Ambon seperti Kuda Putih dan Front Kedaulatan Maluku menganggap bentuk penyerangan tersebut merupakan polarisme dukungan pemerintah daerah kepada Muslim. Rupanya kelompok Kristen menganggap ketidakadilan sosial bagi warga Kristen di Ambon yang menghendaki independensi kebijakan publik dan dominasi sosial kepada warga Muslim⁴³.

Rekonsiliasi Tim 20 Wayame: Penguatan ke Dalam dan Luar

Asal mula tim rekonsiler ini bernama Tim Damai Wayame kemudian dikenal oleh khalayak sebagai Tim 20 Wayame karena para anggotanya terdiri 10 orang Kristiani dan 10 orang Muslim yang bertindak sebagai rekonsiler untuk upaya negosiasi perdamaian antara Islam dan Kristen di Ambon. Markas utama tim ini di desa Wayame yang letaknya di bibir pantai Teluk Ambon, yang didirikan pasca tiga bulan pecahnya kekerasan pertama di kota Ambon pada Maret 1999. Fokus utama sasaran Tim 20 (sebutan Tim 20 Wayame) ialah untuk mencegah eskalasi konflik yang semakin tinggi dan menjaga stabilitas keamanan di Wayame. Ketika pertikaian pecah pertama di Ambon pada tanggal 19 Januari 1999 kemudian disusul serangan berikutnya ke desa Wailete pada 21-22 Januari 1999 sejumlah pemimpin agama dan pemuda di desa tersebut serta bersama Kannes Amanupunyo (Ketua Tokoh Desa Wayame) mengadakan pertemuan membahas insiden yang terjadi dan menemukan solusi bagaimana konflik tidak sampai meluas ke Wayame.

⁴³ Azca, “After Jihad: a Biographical Approach to Passionate Politics in Indonesia”; Noorhaidi, “Militancy and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia.”

Yang menarik dari Tim 20 ini ialah anggotanya berasal dari 2 unsur agama yang sedang bertikai. Walaupun sangat kontras, tetapi 20 orang ini melakukan berbagai upaya agar konflik segera berakhir. Pada tanggal 24 Januari 1999 Tim 20 memanggil pemuka agama Kristen dan Muslim untuk berdialog terbuka dan meyakinkan bahwa perpecahan bukan solusi terbaik, dan kedua agama tidak mengajarkan penganutnya untuk bertikai dan saling bertumpah darah, tetapi menginstruksikan penganutnya untuk saling mencintai dan melindungi. Pertemuan ini menghasilkan sebuah kesepakatan lisan yang diucapkan oleh dua tokoh Muslim dan Kristen Ambon yakni Kiai Abdurrachman Marasabessy dan Pendeta John Sahalessy. Kedua tokoh ini bersumpah di dalam rumah ibadah masing-masing (di Masjid dan di Gereja) seraya mengucapkan kalimat sumpah: “Saya bersumpah di Masjid atau Gereja ini bahwa tidak diperbolehkan bertikai dan saling membunuh satu sama lain. Jauh lebih baik memaafkan dan mencintai daripada membenci dan saling bermusuhan”.

Pasca pecah awal konflik di Ambon, masyarakat Wayame mulai mengkhawatirkan jika konflik sampai meluas ke Wayame. Sebagai persiapan antisipasi tersebut, perwakilan dari Kristen dan Muslim menemui dengan Panglima (Komandan Kompi 733 C) Kompi TNI untuk bermitra menjaga keamanan Wayame. Kesepakatan lisan yang diucapkan oleh masing-masing pemuka agama tersebut kemudian dibawa kepada TNI untuk dibahas di kantor Perumahan Nasional Wayame BTN pada bulan Maret 1999. Pada akhir pertemuan masyarakat sepakat untuk membentuk tim yang terdiri dari kelompok Kristen dan Muslim yang kemudian diberi nama Tim 20 Wayame. Anggota inti tim ini adalah Pendeta John Sahalessy, D. Hunihua, J. Haumahu, J. Dorenge, D. Pieter, Tony Pariela, Kannes Amanupunyo, Abdurrachman Marasabessy, Imam Sonep, Hambali, Jopie Wathloli, Hanafi Marhum, dan La Taibu.

Kedua puluh orang ini lantas bukan kebetulan dibentuk, melainkan diseleksi oleh masing-masing perwakilan dari dua agama di bawah komando Sahalessy. Dia meminta anggota tim untuk selalu berpegang teguh kepada agamanya, berjuang dengan tulus, dan netral. Keesokan harinya 20 orang ini dipanggil untuk berkumpul di aula Gereja Wayame, di mana secara resmi diumumkanlah Tim 20 sebagai upaya rekonsiliasi menjaga perdamaian di Wayame, termasuk mencegah pengaruh luar yang menyebabkan hasutan benih konflik. Setelah *gathering* ini dilakukan, rangkaian pertemuan intensif diadakan secara berkala di tempat publik, seperti di lapangan, pasar, balai kota, perkantoran, tempat peristirahatan, dan tempat peribadatan. Sahalessy mengatakan bahwa semakin banyak insiden kekerasan di Ambon semakin intens juga Tim 20 mengadakan dialog dan pertemuan.

Poin rekonsiliasi yang dilakukan oleh Tim 20 terbagi menjadi 4 (empat) aturan yang harus dipatuhi lengkap dengan sanksi dan hukuman fisik bagi

masyarakat yang melanggar. *Pertama*, umat Kristiani dan Muslim di Wayame tidak boleh saling mengganggu dan mencela satu sama lain dalam bentuk apapun, bagi siapa yang melanggar maka yang bertanggung jawab menghukumnya adalah orang dari kalangan penganut agamanya. *Kedua*, baik orang Kristen maupun Muslim di Wayame tidak diperbolehkan menggunakan, memanggil, dan memakai nama sapaan, seperti “Obet” dan “Acang”, dan atau istilah sarkastik yang bernada merendahkan kelompok agama lain, karena hal ini dapat memprovokasi konflik, bagi yang melanggar aturan ini akan dihukum tegas. *Ketiga*, seluruh warga Wayame dilarang melakukan tindakan kekerasan dan rencana provokasi kepada masyarakat, jika ada warga desa Wayame yang terlibat perkelahian maka ia akan dipaksa meninggalkan desa Wayame; dan jika ada warga desa Wayame ikut dalam insiden kerusukan dan kemudian tewas maka penguburannya dilarang di Wayame. *Keempat*, warga Wayame dilarang membuat senjata, membeli, memasok, atau memproduksi serta mengkonsumsi *sopi* (minuman tradisional yang memabukkan dari pohon aren). Bagi yang melanggar aturan keempat ini akan dikenai sanksi berupa peringatan keras, dikucilkan, dilarang memasuki desa, sampai pada hukuman fisik.

Walaupun Wayame berbeda dengan daerah lainnya di Ambon dalam arti benih konflik lebih kecil, namun potensi timbulnya konflik masih terasa. Ajaran masing-masing agama yang berbeda secara mendasar dalam keyakinan merupakan modal terbesar terjadinya gesekan. Sahalessy mengatakan: “Berkali-kali pihak Kristen dari desa tetangga yang berdekatan dengan Wayame ingin menyerang Muslim di Wayame, dan Muslim di Kotajawa yang berdekatan dengan Wayame juga berencana menyerang orang Kristen di Wayame”. Dari data yang kami dapatkan, ada beberapa Muslim dan Kristiani di Wayame terlibat kerusukan di luar Wayame yang mengakibatkan mereka diusir dari Wayame. Tim 20 dengan gigih berjuang untuk membangun perdamaian dan menjalin komunikasi dengan masyarakat lokal dari berbagai latar belakang suku. Selain pertemuan formal, Tim 20 mengadakan dialog setiap malam di balai desa untuk mengevaluasi perkembangan konflik di kota Ambon dan menjaga desa dari orang luar yang tidak diinginkan.

Sesekali Tim 20 mengadakan silaturahmi ke rumah-rumah orang Kristen dan Muslim untuk memastikan stabilitas keamanan secara internal Wayame. Seperti yang dilakukan oleh Abdurrachman Marasabessy mengunjungi tetangga Kristennya, dan Sahalessy mengunjungi saudara Muslimnya untuk memastikan munculkan benih-benih konflik. Di samping memperkuat rekonsiliasi dari dalam, Tim 20 juga intens melakukan hubungan dengan aparat militer berwenang misalnya Kesatuan 411, Yon Armed 13, Kesatuan 611, dan Kesatuan 403 untuk terus mengawasi dan melindungi Wayame.

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun agama sering menginspirasi, mengilhami, dan melegitimasi konflik berdarah⁴⁴, namun agama masih diharapkan kontribusinya untuk resolusi damai. Upaya membangun perdamaian agama di atas konflik yang sedang bergejolak tentu saja sangat sulit, namun seperti yang dikatakan oleh pakar perdamaian Philpott dan Powers (2010)⁴⁵ bahwa keyakinan terhadap Tuhan, kitab suci, dan ritual yang dijalankan oleh penganutnya akan mencegah timbulnya pertikaian. Seperti yang diajarkan oleh Qur'an bahwa diutusnya Nabi Muhammad Saw adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan li al-'ālamīn*), itu artinya bahwa agama bukan penyebab benih konflik, justru sebaliknya adalah solusi bagi perdamaian dunia.

Menuju Pembangunan Perdamaian

Agama adalah solusi bagi problematika hidup manusia baik secara personal maupun kelompok, namun apa yang terjadi di Ambon merupakan bentuk disintegrasi dan disfungsi sosial dalam memahami agama sebagai penyelamat kehidupan. Dari sini dapat ditarik beberapa garis merah bahwa agama kadang kala mendukung, melegitimasi, meradikalisasi, dan memperburuk konflik yang mengakibatkan perang berdarah antar kelompok⁴⁶. Sebagaimana yang disebutkan di atas, agama juga menjadi pola bentuk baru dalam rekonsiliasi pembangunan perdamaian yang melibatkan seluruh komunitas lokal untuk berdialog dan bermusyawarah mencari titik tengah. Pada kasus di Ambon telah melibatkan upaya kolaboratif dan terintegrasi dalam rekonsiliasi antar kelompok agama.

Meskipun agama telah lama berkontribusi untuk perdamaian dan rekonsiliasi antarkelompok, namun perannya dalam proses perdamaian baru saja dieksplorasi melalui realitas yang terjadi di Ambon. Sejak tahun 2000 upaya negosiasi antar kelompok telah dilakukan secara intensif dengan berbagai pendekatan dan metode rekonsiliasi⁴⁷. Para pelaku perdamaian telah

⁴⁴ Mark Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God, Fourth Edition: The Global Rise of Religious Violence* (Berkeley: University of California Press, 2017).

⁴⁵ Daniel Philpott dan Gerard Powers, *Strategies of Peace* (UK: Oxford University Press, 2010).

⁴⁶ R. Scott Appleby dan Professor of History and the John M. Regan Jr Director of the Kroc Institute for International Peace Studies R. Scott Appleby, *Spokesmen for the Despised: Fundamentalist Leaders of the Middle East* (UK: University of Chicago Press, 1997); Roxanne L. Euben dan Muhammad Qasim Zaman, *Princeton Readings in Islamist Thought: Texts and Contexts from Al-Banna to Bin Laden* (New Jersey: Princeton University Press, 2009); Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God, Fourth Edition*.

⁴⁷ Karen Abi-Ezzi, "Nonviolence and Peace Building in Islam: Theory and Practice," Gainesville: University Press of Florida, 2003, <https://doi.org/10.5860/choice.41-1822>; Appleby, *The Ambivalence of the Sacred*; Diplomacy Marc Gopin James H. Laue Professor and Director of the Center on Religion University and Conflict Resolution George Mason, *Between Eden and Armageddon: The Future of World Religions, Violence, and Peacemaking: The Future of World*

bekerja dan mengambil perannya dalam rekonsiliasi dengan menggunakan nilai-nilai dan gagasan serta atau teks agama untuk mendukung kegiatan penciptaan perdamaian. Ada dua bahan utama yang digunakan dalam penciptaan perdamaian dalam agama yaitu empati dan kasih sayang. Atribut agama terejawantahkan pada kedua aspek ini⁴⁸. Smock mengatakan bahwa kasih sayang merupakan nilai umum dalam penciptaan perdamaian, maka tidak heran jika nilai ini menjadi modal kuat untuk mendorong perang agar tidak terjadi⁴⁹, walaupun budaya menjadi faktor buntunya negosiasi damai antar kubu yang berseberangan⁵⁰.

Sebagai aktor juru damai Tim 20 Wayame telah memberikan teladan bagi pihak yang sedang berseteru yang telah berhasil menjembatani dan membangun kepercayaan serta mengurangi kekerasan massal dengan penciptaan dialog yang baik. Sebagai hasil dari upaya produktif Tim 20, perdamaian akhirnya menyapa Ambon. Tim 20 beserta juru damai lainnya telah membuka jalan bagi penandatanganan perjanjian damai yang dikenal dengan nama “Perjanjian Damai Malino II” pada tahun 2002 yang ditengahi oleh pemerintah Indonesia melalui perundingan yang dilakukan oleh M. Jusuf Kalla selaku Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial. pemerintah juga mengadakan pertemuan dan diskusi rahasia dengan kelompok yang bertikai untuk mengumpulkan informasi yang berpotensi pencapaian kesepakatan damai⁵¹.

Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan informasi di atas dapat diambil simpulan bahwa upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh Tim 20 Wayame merupakan usaha untuk mencapai perdamaian dengan cara yang berbeda. Meskipun upaya ini murni inisiatif dari dua kelompok agama yang sedang bertikai (Kristen dan Islam) bukan dari upaya pemerintah maupun lembaga swadaya internasional, namun strategi ini cukup ampuh dalam mereda bahkan menghilangkan sekat perpecahan yang melanda Ambon dan sekitarnya.

Religions, Violence, and Peacemaking (Oxford University Press, USA, 2000); Daniel Philpott, *Just and Unjust Peace: An Ethic of Political Reconciliation* (UK: Oxford University Press, 2015); Nukhet Ahu Sandal, “Religious Actors as Epistemic Communities in Conflict Transformation: The Cases of South Africa and Northern Ireland,” *Review of International Studies* 37, no. 3 (2011): 929–49.

⁴⁸ Gerrie Ter Haar dan James J. Busuttill, *Bridge or Barrier: Religion, Violence, and Visions for Peace* (Leiden: BRILL, 2005).

⁴⁹ David R. Smock, *Religious Contributions to Peacemaking: When Religion Brings Peace, Not War* (Washington, D.C: U.S. Institute of Peace, 2006), 2.

⁵⁰ Hizkias Assefa, *Peace and Reconciliation as a Paradigm: A Philosophy of Peace and Its Implications on Conflict, Governance, and Economic Growth in Africa* (Nairobi: Nairobi Peace Initiative, 1993).

⁵¹ Hamid Awaludin, *Perdamaian ala JK: Poso tenang, Ambon damai* (Jakarta: Grasindo, 2009).

Semula beranggapan bahwa agama dapat memperkeruh keadaan karena banyak pihak yang menilai bahwa konflik berdarah yang terjadi di Ambon Maluku adalah dari unsur agama. Namun setelah dilakukan penggalan data penelitian didapatkan bahwa benih-benih permusuhan muncul hanya karena masalah sepele yang berujung pada pertikaian secara massal dengan membawa nama agama.

Tindakan yang dilakukan oleh Tim 20 menghasilkan beberapa kesepakatan perjanjian damai yang berakhir pada penandatanganan Malino II. Namun sebelumnya, Tim 20 telah berusaha dengan gigih memperjuangkan rekonsiliasi demi mencapai perdamaian.

Daftar Rujukan

Abi-Ezzi, Karen. "Nonviolence and Peace Building in Islam: Theory and Practice." *Gainesville: University Press of Florida*, 2003. <https://doi.org/10.5860/choice.41-1822>.

Andaya, Barbara Watson. *Islam and Christianity in South-East Asia 1600-1700. Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History Volume 11 South and East Asia, Africa and the Americas (1600-1700)*. Leiden: Brill, 2017. https://doi.org/10.1163/9789004335585_003.

Appleby, R. Scott, dan Professor of History and the John M. Regan Jr Director of the Kroc Institute for International Peace Studies R. Scott Appleby. *Spokesmen for the Despised: Fundamentalist Leaders of the Middle East*. UK: University of Chicago Press, 1997.

Appleby, Scott R. *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1999.

Arifianto, Alexander R. "Explaining the Cause of Muslim-Christian Conflicts in Indonesia: Tracing the Origins of Kristenisasi and Islamisasi." *Islam and Christian-Muslim Relations* 20, no. 1 (1 Januari 2009): 73–89. <https://doi.org/10.1080/09596410802542144>.

Aspinal, E., dan Greg Fealy. "Local Power and Politics in Indonesia." *Decentralisation and democratization. Indonesia update series. Research school of Pacific and Asian studies, Australian National University*, 2003, 259–74.

Assefa, Hizkias. *Peace and Reconciliation as a Paradigm: A Philosophy of Peace and Its Implications on Conflict, Governance, and Economic Growth in Africa*. Nairobi: Nairobi Peace Initiative, 1993.

Awaludin, Hamid. *Perdamaian ala JK: Poso tenang, Ambon damai*. Jakarta: Grasindo, 2009.

Azca, Muhammad Najib. "After Jihad: a Biographical Approach to Passionate Politics in Indonesia." PhD Thesis, University of Amsterdam, 2011.

Bell, James B. *A War of Religion*. United States: Springer, 2008.

Bertrand, Jacques. "Legacies of the Authoritarian Past: Religious Violence in Indonesia's Moluccan Islands." *Pacific Affairs* 75, no. 1 (2002): 57. <https://doi.org/10.2307/4127241>.

———. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Bock, Joseph G. "Communal Conflict, NGO's, and the Power of Religious Symbols." *Development in Practice* 7, no. 1 (1 Februari 1997): 17–25. <https://doi.org/10.1080/09614529754729>.

Buranajaroenkij (she/her/hers), Duanghathai. "Challenges to Women's Inclusion in Peace Processes in Thailand and Myanmar." *International Feminist Journal of Politics* 22, no. 3 (26 Mei 2020): 403–22. <https://doi.org/10.1080/14616742.2019.1698973>.

Burton, Mark, dan Carolyn Kagan. "Liberation Social Psychology: Learning from Latin America." *Journal of Community & Applied Social Psychology* 15, no. 1 (1 Januari 2005): 63–78. <https://doi.org/10.1002/casp.786>.

Chalermripinyorat, Rungrawee. "Dialogue Without Negotiation: Illiberal Peace-Building in Southern Thailand." *Conflict, Security & Development* 20, no. 1 (2 Januari 2020): 71–95. <https://doi.org/10.1080/14678802.2019.1705069>.

Chalk, Peter. "Separatism and Southeast Asia: The Islamic Factor in Southern Thailand, Mindanao, and Aceh." *Studies in Conflict & Terrorism* 24, no. 4 (1 Juli 2001): 241–69. <https://doi.org/10.1080/10576100116748>.

Colombijn, Freek, dan J. Thomas Lindblad. *Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective*. Vol. 194. Leiden: KITLV Press, 2002.

Cooley, Frank Leonard. *Altar and Throne in Central Moluccan Societies: A Study of the Relationship Between the Institutions of Religion and the Institutions of Local Government in a Traditional Society Undergoing Rapid Social Change*. Yale University, 1961.

Dandirwalu, Resa. "Totem Ambon Manise: Membongkar Segregasi Teritorial Berbasis Agama Di Kota Ambon." *Antropologi Indonesia*, 11 Oktober 2016, 30–44. <https://doi.org/10.7454/ai.v35i1.5511>.

Dudouet, Veronique, Hans Giessmann, dan Katrin Planta. *Post-War Security Transitions. Post-War Security Transitions*. 1st Edition. London: Routledge, 2012. <https://doi.org/10.4324/9780203127469-23>.

Duncan, Christopher R. "The Other Maluku: Chronologies of Conflict in North Maluku." *Indonesia*, no. 80 (2005): 53–80.

Engvall, Anders, dan Isak Svensson. "Peace Talks and Valid Spokespersons: Explaining the Onset of Negotiations in Southern Thailand." *International Negotiation* 25, no. 3 (17 Agustus 2020): 495–518. <https://doi.org/10.1163/15718069-25131248>.

Euben, Roxanne L., dan Muhammad Qasim Zaman. *Princeton Readings in Islamist Thought: Texts and Contexts from Al-Banna to Bin Laden*. New Jersey: Princeton University Press, 2009.

Ginty, Roger Mac. "Where Is the Local? Critical Localism and Peacebuilding." *Third World Quarterly* 36, no. 5 (4 Mei 2015): 840–56. <https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1045482>.

Haar, Gerrie Ter, dan James J. Busuttil. *Bridge or Barrier: Religion, Violence, and Visions for Peace*. Leiden: BRILL, 2005.

Hertog, Katrien. "Religious Peacebuilding: Resources and Obstacles in the Russian Orthodox Church for Sustainable Peacebuilding in Chechnya." *KU Leuven*, Mei 2008. <https://lirias.kuleuven.be/1862904>.

Hume, Cameron R., dan Richard Synge. *Ending Mozambique's War: The Role of Mediation and Good Offices*. Washington: US Institute of Peace Press, 1994.

Jeroen, Adam. "Communal Violence, Forced Migration and Social Change on the Island of Ambon, Indonesia." PhD Thesis, Ghent University, 2009.

Juergensmeyer, Mark. *Terror in the Mind of God, Fourth Edition: The Global Rise of Religious Violence*. Berkeley: University of California Press, 2017.

Klinken, Gerry van. *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*. London: Routledge, 2007.

Klinken, Gerry van. "The Maluku Wars: Bringing Society Back In." *Indonesia* 71 (April 2001): 1. <https://doi.org/10.2307/3351455>.

Klinken, Van, dan Henk Schulte Nordholt. *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Subarto Indonesia*. Leiden: KITLV Press, 2007.

Ling, Chong Wu. "Violence, Conflict and Security in Archipelagic Southeast Asia." *Asian Ethnicity* 8, no. 2 (1 Juni 2007): 181–86. <https://doi.org/10.1080/14631360701406304>.

Lings, Martin. "Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources. 1983." *Rochester, Vt Inner Traditions International*, 2006.

Lowry, Carmen S., dan Stephen Littlejohn. "Dialogue and the Discourse of Peacebuilding in Maluku, Indonesia." *Conflict Resolution Quarterly* 23, no. 4 (1 Juni 2006): 409–26. <https://doi.org/10.1002/crq.147>.

Nan, Susan Allen, dan Andrea Strimling. "Coordination in Conflict Prevention, Conflict Resolution and Peacebuilding." *International Negotiation* 11, no. 1 (1 Januari 2006): 1–6. <https://doi.org/10.1163/157180606777835784>.

Ndiaye, A. "Religion, faith and toleration." *Diogenes* 56, no. 4 (2009). <https://doi.org/10.1177/0392192110365291>.

Nilsen, Marte. "Will Democracy Bring Peace to Myanmar?" *International Area Studies Review* 16, no. 2 (1 Juni 2013): 115–41. <https://doi.org/10.1177/2233865913492961>.

Noorhaidi, Laskar Jihad-Islam. "Militancy and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia." PhD Thesis, PhD Dissertation (Leiden, 2005), 2005.

Pannell, Sandra. "Violence, Society and the State in Eastern Indonesia: Context." Dalam *A State of Emergency: violence, society and the state in Eastern Indonesia*, disunting oleh Sandra Pannell, 11–36. Darwin, NT, Australia: Northern Territory University Press, 2003. <https://researchonline.jcu.edu.au/7301/>.

Philpott, Daniel. *Just and Unjust Peace: An Ethic of Political Reconciliation*. UK: Oxford University Press, 2015.

Philpott, Daniel, dan Gerard Powers. *Strategies of Peace*. UK: Oxford University Press, 2010.

Poggo, S. *The First Sudanese Civil War: Africans, Arabs, and Israelis in the Southern Sudan, 1955-1972*. New York: Springer, 2008.

Queen, Christopher S., dan Sallie B. King. *Engaged Buddhism: Buddhist Liberation Movements in Asia*. Albany: SUNY Press, 1996.

Ranstorp, Magnus. "Terrorism in the Name of Religion." *Journal of International Affairs* 50, no. 1 (1996): 41–62.

Raya, Moch Khafidz Fuad. "Resolusi Konflik Dalam Institusi Pendidikan Islam (Kajian Empirik Dan Potensi Riset Resolusi Konflik)." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 1, no. 1 (2 Oktober 2016): 71–85. <https://doi.org/10.35316/jpii.v1i1.38>.

Sandal, Nukhet Ahu. "Religious Actors as Epistemic Communities in Conflict Transformation: The Cases of South Africa and Northern Ireland." *Review of International Studies* 37, no. 3 (2011): 929–49.

SCHULZE, KIRSTEN E. "From Ambon to Poso: Comparative and Evolutionary Aspects of Local Jihad in Indonesia." *Contemporary Southeast Asia* 41, no. 1 (2019): 35–62.

Schulze, Kirsten E. "Laskar Jihad and the Conflict in Ambon." *The Brown Journal of World Affairs* 9, no. 1 (2002): 57–69.

Shapiro, Ilana. "Beyond Modernization: Conflict Resolution in Central and Eastern Europe." *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 552, no. 1 (1 Juli 1997): 14–27. <https://doi.org/10.1177/0002716297552001002>.

Smock, David R. *Religious Contributions to Peacemaking: When Religion Brings Peace, Not War*. Washington, D.C: U.S. Institute of Peace, 2006.

Spyer, Patricia. "Fire without Smoke and Other Phantoms of Ambon's Violence: Media Effects, Agency, and the Work of Imagination." *Indonesia* 74 (Oktober 2002): 21. <https://doi.org/10.2307/3351523>.

Tadjoeddin, Mohammad Zulfan, Athia Yumna, Sarah E. Gultom, M. Fajar Rakhmadi, dan Asep Suryahadi. "Inequality and Violent Conflict: New Evidence from Selected Provinces in Post-Soeharto Indonesia." *Journal of the Asia Pacific Economy* 0, no. 0 (31 Mei 2020): 1–22. <https://doi.org/10.1080/13547860.2020.1773607>.

Tan, Andrew. "Armed Muslim Separatist Rebellion in Southeast Asia: Persistence, Prospects, and Implications." *Studies in Conflict & Terrorism* 23, no. 4 (1 Oktober 2000): 267–88. <https://doi.org/10.1080/10576100050174986>.

Testriono, Testriono. "Is Indonesian Islam Different? Islam in Indonesia in a Comparative International Perspective." *Studia Islamika* 18, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.15408/sdi.v18i1.445>.

University, Diplomacy Marc Gopin James H. Laue Professor and Director of the Center on Religion, and Conflict Resolution George Mason. *Between Eden*

and *Armageddon: The Future of World Religions, Violence, and Peacemaking: The Future of World Religions, Violence, and Peacemaking*. Oxford University Press, USA, 2000.

Vahed Goolam. "Islam in the Public Sphere in Post-Apartheid South Africa: Prospects and Challenges." *Journal for Islamic Studies* 27, no. 1 (1 Januari 2007): 116–49. <https://doi.org/10.10520/EJC47138>.

Vyver, Johan D. van der. "Constitutional Perspective of Church-State Relations in South Africa." *Brigham Young University Law Review* 1999 (1999): 635.

Weigel, George. "Religion and Peace: An Argument Complexified." *The Washington Quarterly* 14, no. 2 (1 Juni 1991): 27–42. <https://doi.org/10.1080/01636609109477678>.

Welsh, Helga A. "Political Transition Processes in Central and Eastern Europe." *Comparative Politics* 26, no. 4 (Juli 1994): 379. <https://doi.org/10.2307/422022>.